

BAB V

KESIMPULAN

Amerika Serikat sebagai aktor global selalu ingin mendominasi dunia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk selalu terlibat dalam setiap kerjasama yang dibentuk, termasuk juga dalam kerjasama ekonomi. AS merasa keterlibatannya dalam setiap kerjasama ekonomi memiliki kepentingan besar untuk mendapatkan beberapa hal seperti pengaruh, pasar, maupun suplai dari negara lain. Sejak bergabung dengan APEC, AS selalu ingin bergabung dengan blok-blok perdagangan dengan model kewilayahan lainnya, termasuk NAFTA.

Perluasan kerjasama ekonomi dengan model kewilayahan (regional) ini terus dilakukan AS, hingga yang terbaru yaitu bergabungnya AS ke dalam negosiasi *Trans-Pacific Partnership (TPP)* pada tahun 2009 sebagai upaya perluasan kerjasama ekonomi di wilayah Asia Pasifik. TPP menjadi suatu perjanjian yang menarik bagi AS karena dinilai memiliki potensi untuk dapat mengembangkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik yang kini mulai pudar dengan hadirnya aktor global yang lain. Bergabungnya Amerika Serikat dengan TPP merupakan suatu proyek besar yang begitu diupayakan oleh administratif Obama. Obama sangat gencar menjadikan TPP sebagai langkah bagi AS untuk memperluas pengaruh di Asia Pasifik, baik dari segi ekonomi maupun politiknya. Hal ini dibuktikan melalui berbagai upaya dan proses panjang yang dilakukan selama dua periode kepemimpinan Obama. Bagi Obama, TPP merupakan suatu peluang yang baik di masa depan.

Namun, tekad Obama ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh administratif Obama belum juga menemukan titik terang meskipun menteri perdagangan AS sudah menandatangani *TPP Agreement*. Kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2016 di Auckland, Selandia Baru, bersama dengan 12 negara yang terlibat negosiasi ini tidak serta membuat AS resmi

tergabung dalam kesepakatan tersebut. Tersisa satu tahapan, yaitu proses pengesahan yang tak kunjung mendapatkan dukungan dari Kongres untuk melanjutkan proses ratifikasi kesepakatan tersebut hingga akhir kepemimpinan Obama. Disamping itu, tertahannya AS dalam rencana meratifikasi TPP *Agreement* juga disebabkan oleh adanya kontroversi yang terjadi di dalam domestik dan berkejolak di tengah masyarakat AS.

Kontroversi mengenai TPP terus menjadi sebuah pembahasan hingga terjadinya pemilihan presiden AS pada tahun 2016. Berbeda dengan Obama, salah satu kandidat dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2016 Donald Trump justru memandang TPP sebagai sebuah kesepakatan buruk, yang hanya akan merugikan AS di masa yang akan datang. Trump juga memasukkan rancangan kebijakan untuk merevitalisasi ekonomi pada saat kampanye pemilihan presiden AS. Kemenangan pun diraih oleh Trump. Setelah resmi dilantik, Trump kemudian merealisasikan keputusan tersebut, dengan melakukan pembatalan untuk bergabung dengan TPP serta menarik dukungan yang diberikan oleh AS pada masa kepemimpinan Obama. Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Trump pada awal kepemimpinannya ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan mengenai alasan perbedaan pandangan mengenai keputusan antara kedua pemimpin ini.

Keputusan Trump untuk menghentikan dukungan AS terhadap TPP bertolak belakang dengan sikap Obama yang sangat antusias menjadikan TPP sebagai wadah kerjasama ekonomi AS dengan negara-negara di Asia Pasifik. Perbedaan sikap ini diduga dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi antara kedua tokoh pemimpin ini dalam memandang TPP. Pada era Obama, AS terlihat mendukung penuh AS untuk bergabung dengan TPP dan mewujudkan TPP *Agreement*. Namun, hal sebaliknya dilakukan pada masa pemerintahan Trump dengan menghentikan dukungan serta menarik AS dari keterlibatannya dengan TPP.

Trump yang terlahir dengan latarbelakang pebisnis meyakini bahwa kedepannya TPP *Agreement* hanya akan merugikan AS. Dalam kesepakatan juga disebutkan bahwa TPP

akan menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif secara substansial kepada semua perdagangan barang dan jasa, dan mencakup spektrum penuh perdagangan, termasuk perdagangan dan investasi barang dan jasa. Pengurangan tarif ini akan mengakibatkan produk yang dihasilkan dari negara anggota TPP akan dengan mudah masuk ke dalam pasar AS, sedangkan produk AS akan mengalami kesulitan untuk memasarkan produk kepada negara-negara anggota TPP karena cenderung mendapat harga yang lebih tinggi, sesuai dengan biaya produksi. Pemberlakuan pengurangan tarif pada perjanjian ini yang kemudian menjadi alasan pertama bagi Trump untuk segera mundur dan menarik seluruh dukungan yang diberikan oleh AS terhadap TPP.

Hal lain yang juga dicemaskan oleh Trump yaitu mengenai hilangnya pekerjaan yang akan ditimbulkan oleh TPP *Agreement* terjadi dalam perjanjian NAFTA yang sudah berjalan dalam kurun waktu dua puluh tahun antara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Sejak perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994, NAFTA telah secara sistematis menghilangkan sebagian besar hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan bebas dan investasi antara ketiga negara NAFTA. Hal ini kemudian menyebabkan hilangnya pekerjaan saat produksi pindah ke Meksiko, karena pengusaha AS lebih mampu membayar pekerja dengan upah dan tunjangan yang lebih rendah. Mengingat bahwa kedua negara yang tergabung dalam NAFTA juga merupakan mitra yang sama yang akan dihadapi oleh AS pada TPP *Agreement* dan seolah hanya memindahkan dari NAFTA menjadi TPP yang lebih luas cakupannya.

Pembahasan di atas mengantarkan pada aplikasi Teori Persepsi di mana nilai yang dibawa oleh pembuat kebijakan dan fakta mengenai apa yang telah terjadi dapat mempengaruhi persepsi yang mengantarkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Sehingga, penelitian ini berhasil membuktikan dugaan dari hipotesa yang menyatakan bahwa alasan Trump menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena didorong oleh persepsi Trump bahwa kedepannya TPP

Agreement hanya akan merugikan AS. Sehingga, temuan dari penelitian skripsi ini semakin menguatkan argumen bahwa perubahan kepemimpinan akan berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang dibentuk, dan tiap pembuat kebijakan memiliki persepsinya masing-masing.

Dalam kasus penghentian dukungan AS terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Trump, mengingatkan penulis pada penjelasan Eugene mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang melibatkan berbagai sumber yang saling terkait antara satu sama lain, di mana salah satunya adalah *individual sources*. Dalam penjelasannya, Eugene mengatakan bahwa politik luar negeri AS dapat dipengaruhi oleh *individual sources*, yang mana karakteristik seorang pembuat kebijakan dapat menentukan arah dari kebijakan luar negeri AS karena di dalam proses pembuatan kebijakan sifat dari presiden dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

Penelitian dan tulisan ini juga tidak lepas dari kontribusi mata kuliah Politik Global Amerika Serikat yang penulis ambil ketika perkuliahan berlangsung. Sehingga, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengayaan dalam mata kuliah tersebut. Dan setelah penelitian ini dilakukan terdapat beberapa hal menarik untuk diteliti sebagai pelengkap dari penelitian mengenai Politik Luar Negeri Amerika Serikat, terutama dalam keterlibatannya dengan *Trans-Pacific Partnership*. Yang pertama, mengenai bagaimana kelanjutan dari rencana Trump untuk kembali melakukan negosiasi ulang perjanjian NAFTA. Yang kedua mengenai nasib kelanjutan dari TPP pasca mundurnya AS dari keterlibatan. Yang ketiga, mengenai keinginan Trump untuk kembali bergabung dengan TPP dan melakukan negosiasi ulang terhadap TPP *Agreement*. Dan yang terakhir yaitu mengenai peluang bagi Tiongkok untuk mendekati diri pada negara-negara anggota TPP, setelah AS tidak lagi terlibat dalam *Trans-Pacific Partnership*.